

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia Merupakan negara besar yang memiliki ratusan juta penduduk. Keragaman rakyat di Indonesia semakin menambah warna karakteristik rakyat Indonesia, mulai dari keragaman suku, bahasa, dan budaya. Permasalahan yang beragam terkadang muncul di Indonesia, mulai dari permasalahan perorangan maupun kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan gejolak di kehidupan masyarakat. Sebagai bangsa besar yang ingin bercita - bercita menjadi negara maju, tentu saja perlu adanya gotong – royong antara masyarakat dengan pemerintah.

Maka untuk menerima setiap masukan ataupun aspirasi dari rakyat kepada pemerintah perlu adanya perwakilan rakyat yang diharapkan lebih efektif untuk menjalankan fungsi – fungsi negara dan roda pemerintahan. Saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat struktur lembaga – lembaga negara untuk mengatur dan melayani rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan itu maka presiden pertama Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 (12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari lahirnya DPR RI yang sekarang telah menjadi salah satu lembaga Negara yaitu sebagai wakil rakyat.

DPR RI merupakan sebuah lembaga legislatif negara yang mewakili rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan dan membuat kebijakan untuk rakyat. Adapun anggota DPR RI adalah orang yang mewakili rakyat dari setiap daerah pemilihannya masing – masing pada saat pemilu. DPR RI bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah terkait permasalahan tertentu serta kritik yang disampaikan oleh rakyat.

Hal ini sejalan dengan sistem demokrasi bahwa rakyat berhak memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi, karena kedaulatan hanya ada di tangan rakyat. Maka sudah sepatutnya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun lembaga negara seperti Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif merupakan lembaga sarana Pelayanan rakyat yang bertugas untuk melayani rakyat dengan penuh keadilan.

Sejak lama DPR RI telah menjadi tempat bagi rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi secara perorangan maupun Kelompok. Rakyat yang menyampaikan aspirasi secara berkelompok biasa disebut dengan massa unjuk rasa. Sering sekali DPR RI menjadi tempat bagi rakyat untuk berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah melalui DPR RI terkait permasalahan tertentu. Rakyat yang berunjuk rasa adalah rakyat yang memiliki latar belakang berbeda seperti kalangan buruh pekerja, buruh petani, mahasiswa, ojek *online* dan atau masyarakat dari kalangan bawah.

Massa unjuk rasa melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang utama DPR RI yang diatur oleh koordinator lapangan. Kemudian koordinator lapangan berorasi untuk menyampaikan maksud mereka melakukan unjuk rasa. Sebelum rakyat melakukan unjuk rasa, rakyat wajib membuat surat izin unjuk rasa dan melaporkan aksi yang akan mereka lakukan kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hal ini bertujuan agar rakyat yang berunjuk rasa dapat berjalan dengan baik serta dikawal oleh pihak kepolisian. Beberapa peraturan yang telah ditetapkan diantaranya massa unjuk rasa harus berjalan dengan tertib, dilarang anarkis, dilarang menghancurkan fasilitas umum, dilarang membawa senjata tajam atau sejenisnya, dilarang membawa anak kecil, dan batas akhir melakukan unjuk rasa pada pukul 18.00 WIB.

Aspirasi yang disampaikan merupakan bentuk rasa kekecewaan massa yang berunjuk rasa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat dan tidak berkeadilan. DPR RI selalu memberikan kesempatan bagi massa unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi ataupun kritiknya kepada DPR RI untuk disampaikan kepada pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat sebagaimana mestinya dan merupakan salah satu tugas DPR RI sebagai wakil rakyat.

Ketika unjuk rasa berlangsung, Pihak DPR RI mempersilahkan perwakilan dari massa unjuk rasa untuk masuk ke gedung DPR RI dan berdiskusi langsung terkait permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan agar proses negosiasi dan diskusi dapat berjalan dengan efektif dibandingkan dengan harus memasukan semua peserta unjuk rasa yang jumlahnya cukup banyak.

Aspirasi atau kritik yang disampaikan merupakan permasalahan yang harus dibahas dengan serius serta hati-hati, Agar suasana tetap kondusif mengingat banyak dan sensitifnya permasalahan pada kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Maka dari itu bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI atau disingkat dengan PDM selaku perangkat DPR RI, Dikerahkan terlebih dahulu untuk menghadapi massa unjuk rasa. Hal ini dilakukan agar komunikasi dapat terjalin dengan baik antara kedua belah pihak.

PDM DPR RI memiliki tugas yang cukup berisiko karena harus berhadapan langsung dengan pihak unjuk rasa. PDM DPR RI berperan penting dalam menghadapi pengunjuk rasa. Tugas PDM DPR RI adalah membangun dan mengatur terlebih dahulu komunikasi kepada khalayak agar aman dan terkendali sehingga PDM dapat selalu menjaga citra instansi.

PDM DPR RI harus tetap berperilaku ramah baik konsisten terpercaya kepada khalayak untuk meyakinkan khalayak bahwa instansi atau perusahaan dapat melayani khalayak dengan baik agar instansi atau perusahaan tetap stabil dan khalayak memiliki pandangan yang baik terhadap instansi.

Bagian Penyalur Delegasi Setjen DPR RI memiliki salah satu tugas yaitu menghadapi dan menerima terlebih dahulu massa unjuk rasa. Maka dari itu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi maka unit PDM harus memiliki strategi komunikasi yang tepat agar komunikasi dapat berjalan dengan baik.





Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peran Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI Dalam Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa di DPR RI ?
- 2) Bagaimana Proses Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa di DPR RI ?
- 3) Apa Saja Hambatan dan Solusi Yang dihadapi Oleh Subbag Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI Dalam Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa di DPR RI ?

Tujuan

Tujuan penulisan ini akan menjawab permasalahan yang ditanyakan dalam rumusan masalah pada laporan ini. Maka Tujuan dari laporan ini adalah :

- 1) Menjelaskan Peran Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI Dalam Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa
- 2) Memaparkan Proses Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI Dalam Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa
- 3) Menjelaskan Hambatan dan solusi yang dihadapi Sub Bagian Penyaluran Delegasi Masyarakat Setjen DPR RI Dalam Penerimaan Delegasi Unjuk Rasa

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan PKL di DPR RI adalah kualitatif yaitu langsung terjun dalam kegiatan unit UPDM, Sehingga bisa langsung melihat dan merasakan kegiatannya. Seperti diketahui unit UPDM berkegiatan Komunikasi langsung di lapangan dengan khalayak banyak orang. Dalam kegiatannya, banyak sekali manfaat dalam melaksanakan PKL di unit UPDM karena dilibatkan langsung dalam setiap penugasan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Banyak hal baru yang didapat dalam melakukan strategi komunikasi dengan banyak orang, terlebih cara berkomunikasi dengan orang yang dianggap terhormat sekalipun di DPR RI. Sehingga bisa menyalurkan atau mempraktekkan keilmuan komunikasi dengan lebih menantang akan tetapi harus tepat mengingat orang – orang yang dihadapi memiliki latar belakang berbeda – beda.

Pengambilan Bidang Kajian PKL bertujuan melaksanakan keilmuan secara langsung dilapangan bagaimana orang komunikasi melaksanakan tugas di medan yang sebenarnya. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi di tempat bidang kajian PKL yang sudah betaraf nasional karena harus menghadapi permasalahan yang menyangkut banyak orang dari berbagai daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.